

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang pemerintahnya cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat, berbagai hal yang dilakukan pemerintah agar terjaminnya kelangsungan hidup dari setiap masyarakat. Cara dan upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk menjadikan negaranya menjadi aman, nyaman, dan sejahtera bagi setiap masyarakat. Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor. 63 KEP/ M.PAN/ 7/ 2003, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2016, p. 6)

Untuk menjamin kesejahteraan tersebut maka pemerintah sebagai petinggi pada suatu negara memiliki program-program pemberdayaan agar dapat memberikan kehidupan yang layak untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan

upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat (Dr. Her Subaris Kasjono, SKM., 2021, p. 28). Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjadikan masyarakatnya agar lebih mandiri, kemandirian yang dimaksud disini meliputi masyarakat yang dapat berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti di bidang pembangunan, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, dibidang kesehatan dan lain sebagainya.

Secara individu, aspek kesehatan berpengaruh terhadap produktivitas kerja individu tersebut. Kondisi kesehatan seorang tenaga kerja pasti berkontribusi terhadap kehadiran kerja, output yang diproduksi, dan tingkat pendapatan yang diperoleh. Sedangkan secara sosial, kondisi kesehatan seseorang mempengaruhi berjalannya proses interaksi sosial yang dilakukan oleh individu tersebut dengan individu lainnya. Secara makro, tingkat kesehatan masyarakat di suatu negara juga berpengaruh terhadap pembangunan di negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu

unsur kesejahteraan masyarakat. Karena kondisi kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan tingkat kemiskinan, maka tingkat kemiskinan juga berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup sehingga terjadi penurunan kualitas kesehatannya. (Undang-Undang No. 36 Tentang Kesehatan, 2009).

Khusus di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya pemberdayaan. Diantaranya di bidang peningkatan sarana air bersih, sanitasi yang dimana termasuk program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) dan perwujudan perilaku sehat. Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pemerintah membuat program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) dan menyusul program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) (Sari, Suci Kurnia, Afrizal, 2019). Kedua program tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang layak serta meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pemerintah berkewajiban untuk dapat memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi warga negaranya, berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah berguna agar warganya dapat memenuhi kebutuhan dibidang kesehatan dan bisa memiliki kualitas kesehatan yang layak (Ashari & Akbar, 2016). Program dari pemerintah ini tidak hanya terfokus kepada objek manusianya saja, akan tetapi juga memperhatikan lingkungan agar tidak terjangkit penyakit dari lingkungan tersebut. Diantara berbagai program kesehatan yang dilakukan pemerintah tersebut salah

satunya yaitu program Stop BABS, yaitu merupakan program yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menjadikan lingkungan yang ditempati oleh masyarakat tersebut menjadi lebih sehat dan nyaman ditempati masyarakatnya..

Salah satu perilaku berkaitan dengan sanitasi yang buruk dan penyakit berbasis lingkungan adalah praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Berdasarkan riset gabungan UNICEF dan WHO dalam *Joint Monitoring Program* tahun 2019, ada sebanyak 673 juta penduduk dunia masih melakukan praktik buang air besar sembarangan, sebanyak 51 juta dilakukan oleh penduduk Indonesia (UNICEF, 2021). Selanjutnya dijelaskan setidaknya 9% rumah tangga di Indonesia masih melakukan praktik BABS, hal seperti ini harus segera dicegah agar tidak menimbulkan hal yang semakin parah yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Berbagai alasan digunakan oleh masyarakat untuk buang air besar sembarangan, antara lain anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih enak BAB di sungai, tinja dapat untuk pakan ikan, dan lain-lain yang akhirnya dibungkus sebagai alasan karena kebiasaan sejak dulu, sejak anak-anak, sejak nenek moyang, dan sampai saat ini tidak mengalami gangguan kesehatan. Alasan dan kebiasaan tersebut harus diluruskan dan dirubah karena akibat kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat jelas-jelas akan memperbesar masalah kesehatan. Dipihak lain bilamana masyarakat berperilaku higienis, dengan membuang air besar pada tempat yang benar, sesuai dengan kaidah kesehatan, hal tersebut akan dapat mencegah dan menurunkan kasus-kasus penyakit menular (Bachri & S, 2017). Dalam kejadian diare misalnya, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi

dasar, dalam hal ini meningkatkan jamban keluarga, akan dapat menurunkan kejadian diare sebesar 32% dan 45% dengan Perilaku CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun). Pelatihan, pemicuan, sosialisasi serta penyuluhan yang telah dilakukan juga belum mampu untuk mewujudkan kelurahan ODF (Open Defecation Free). Hal ini disebabkan hanya beberapa rumah saja yang belum memiliki jamban sehat. Pada dasarnya sudah terjadi peningkatan perubahan perilaku masyarakat untuk tidak lagi BABS. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya kepemilikan jamban di setiap rumah. Belum semua rumah memiliki jamban sehat melainkan sharing ke tetangga.

Pelayanan sanitasi di Indonesia sangat bervariasi, pelayanan sanitasi tertinggi berada di kota-kota sedangkan di kabupaten belum mendapatkan pelayanan sanitasi yang memadai. Demikian juga pelayanan sanitasi yang dilakukan di Sumatera Barat, kabupaten-kabupaten dan kota-kota kecil yang ada di Sumatera Barat belum mendapat pelayanan sanitasi yang memadai. Oleh karena itu agar pembangunan sanitasi dengan penekanan aspek pemerataan pembangunan dan pelayanan sanitasi yang memadai maka diperlukan gambaran sanitasi di suatu wilayah. Dan di Provinsi Sumatera Barat sendiri juga banyak diadakan berbagai program-program untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri.

Program Stop BABS yang dilaksanakan dengan metode pemberdayaan yakni diadakannya pemicuan, pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana program berupaya mengajak masyarakat berpartisipasi secara sadar untuk meningkatkan akses sanitasi. Oleh karena itu pemerintah mulai merancang berbagai program dan kebijakan yang

berkaitan dengan meningkatkan kebutuhan sanitasi yang salah satunya yaitu Program Stop BABS ini.

Padang Panjang sebagai salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kesehatan yang cukup diperhatikan oleh pemerintahnya. Dengan berbagai program-program yang telah berlangsung, Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Sumatera Barat yang lolos verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS), Swasti Saba Wistara Tingkat Nasional. Dan memenangkan penghargaan sebagai Kota Sehat serta menerima tiga piagam penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan Swasti Saba Wistara Tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Penghargaan Kota Sehat Stop BABS, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari Provinsi Sumatera barat. Diantara program pencegahan BABS yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang diantaranya pembangunan IPAL Komunal dan Jamban sehat, yang merupakan sarana untuk Buang Air Besar bagi masyarakat yang telah memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yang tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.

Kota Padang Panjang terdiri dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur, setiap kecamatan memiliki lima kelurahan. Program Stop BABS ini dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang pada tingkat kelurahan. Dari banyaknya kelurahan yang menjalankan program Stop BABS ini, Kelurahan Ekor Lubuk merupakan salah satu kelurahan yang sukses dalam menjalankan program, Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang,

Kelurahan Ekor Lubuk memiliki tingkat buang air besar pada jamban sehat nya 69.4% di tahun 2019. Setelah diadakannya program Stop BABS dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Kelurahan Ekor Lubuk mendapatkan peningkatan menjadi 100%. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh kelurahan Ekor Lubuk, yang dinobatkan sebagai juara kelurahan terbaik dalam upaya mengubah perilaku masyarakat menjadi higienis dan saniter melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat Nasional/Provinsi yang diserahkan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat (Ira Febrianti, 2021). Oleh karena itu untuk lebih memfokuskan penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Ekor Lubuk sebagai lokasi penelitian.

Dengan adanya program Stop BABS yang dilaksanakan pemerintah Kota Padang Panjang yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Padang Panjang berupaya melakukan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan keberhasilan dari program Stop Buang Air Besar Sembarangan ini, serta adanya peran penting masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program Stop BABS ini tidak dapat dikecualikan.

1.2 Rumusan Masalah

Kota Padang Panjang menerima penghargaan sebagai Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu Penghargaan Kota Sehat Stop BABS, yang mana Kelurahan Ekor Lubuk dalam penilaian Kota Sehat Stop Buang Air Besar Sembarangan ini menjadi salah satu kelurahan yang turut berperan dalam

mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Sehat. Prestasi yang diraih Kelurahan Ekor Lubuk ini bisa menunjukkan bahwa kelurahan tersebut berhasil melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Keberhasilan yang diraih oleh Kelurahan Ekor Lubuk diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatannya.

Prestasi yang diraih Kelurahan Ekor Lubuk ini bisa menunjukkan bahwa Kelurahan Ekor Lubuk tersebut berhasil menyelesaikan program Stop buang Air Besar Sembarangan. Keberhasilan yang diraih oleh Kelurahan Ekor Lubuk ini tidak terlepas dari baiknya pengelolaan dan pemberdayaan dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Sehingga Kelurahan ekor Lubuk dapat menjadi contoh bagi kelurahan yang lainnya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan program Stop Buang Air Besar Sembarangan ini, maka Pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini ialah **“Bagaimana strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyelesaikan program Stop BABS?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan peneliti diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan program Stop BABS.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan program Stop BABS.
- b. Untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur dalam bidang pembangunan perdesaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan yang bermanfaat bagi pemerintah di daerah penelitian terutama terkait program Stop BABS.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Strategi

Strategi memiliki banyak sekali definisi dalam perkembangannya sebagai sebuah konsep. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *stratēgia*, yang

memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan. Dalam perkembangannya, definisi konsep strategi semakin banyak dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumberdaya perusahaan dalam jumlah yang besar (Wirawan, 2017). Selain itu, strategi memengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan yang berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan.

Menurut Kotler dan Armstrong perusahaan, organisasi, maupun lembaga harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dari para pesaingnya dalam rangka memuaskan konsumen. Jadi, strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi pesaing. Merancang strategi-strategi yang bersaing dimulai dengan melakukan analisis pesaing secara lengkap.

Sementara menurut Weelan dan Hunger, strategi diartikan sebagai rencana utama yang komprehensif yang menyatakan bagaimana perusahaan mencapai misi dan tujuannya dengan cara memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan ketidakunggulan dengan memperkecil kerugian. (Abdussamad & Amala, 2017).

Pada dasarnya tujuan dari penetapan strategi yaitu supaya proses dalam pengambilan keputusan terencana dengan baik dan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama serta sebagai pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan

suatu kegiatan secara efektif (Siagian, 2012). Manfaat penetapan strategi akan dapat dirasakan oleh suatu organisasi baik dari segi internal maupun segi eksternal organisasi.

Sedangkan strategi sosial adalah, cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupannya (Indraddin & Irwan, 2016).. Alternatif yang diambil untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan adalah melakukan strategi sosial untuk bisa berbuat, bertindak dan menghasilkan.

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Ada pun pemberdayaan masyarakat para ahli diantaranya, Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan Soebiato 2013:32) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sesuatu kegiatan yang sengaja dilakukan 8 dalam rangka memberikan fasilitas kepada masyarakat setempat untuk merencanakan, memutuskan, hingga mengelola sumber daya yang dimiliki, salah satunya melalui *collection, action, dan networking*, sehingga mereka diharapkan mampu memperoleh kemampuan dan kemandirian dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial.

Chambers (1996:142) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu konsep tentang pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan ini menggambarkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan mencakup hal-hal yang lebih luas dari sekadar upaya memenuhi kebutuhan dasar, atau dari sekadar metode yang digunakan untuk meminimalisasi kemiskinan berkelanjutan (*safety net*).

Sumodiningrat (2003:37), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan atau mawadahi kelompok yang lemah (*miskin*), tujuannya adalah supaya mereka memperoleh akses terhadap sumberdaya, yang mencakup modal, informasi, teknologi, hingga jaminan pemasaran, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kemajuan dan perkembangan usaha mereka dapat dirasakan, sehingga perbaikan pendapatan dan perluasan kesempatan bekerja dapat terwujud demi kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Menurut Jim Ife (2008:124) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memberikan tempat kepada sumber daya manusia agar memperoleh kesempatan, keterampilan, pengetahuan, dan sumberdaya agar bertambahnya kemampuan berpartisipasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, serta menentukan masa depan. Dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah pemahaman bahwa ketidakberdayaan masyarakat muncul dari ketiadaan kekuatan (*powerless*) dari masyarakat itu sendiri. Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis

kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu :

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Biasanya, upaya dilakukan melalui pemberian kepercayaan kepada masyarakat agar menentukan sendiri pilihan atau kesempatan hidup yang lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Upaya yang dilakukan biasanya melalui pendampingan kepada masyarakat untuk menjelaskan kebutuhan mereka.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pada bagian ini, pemberdayaan dilakukan melalui metode pengembangan kemampuan agar mampu mengekspresikan kebebasan mereka dalam suatu budaya politik
- d. Kekuatan kelembagaan. Upaya pemberdayaan jenis ini dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan, keluarga, kesehatan, keagamaan, kesejahteraan sosial, media, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Upaya pemberdayaan yang dilakukan pada jenis ini biasanya dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (dalam Maryani, 2019:13).


1. Tahap Persiapan Pada tahap ini biasanya terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Pertama, persiapan tenaga penunjang pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Kedua, persiapan lapangan yang biasanya dilakukan secara nondirektif. Persiapan tenaga penunjang pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.
2. Tahap Pengkajian (*Assessment*) Pada tahapan ini, pemberdayaan dapat dilakukan baik secara individual maupun melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Agar program tepat sasaran, petugas harus berupaya mengidentifikasi masalah, seperti kebutuhan yang dirasakan serta sumber daya yang dimiliki oleh kliennya. Artinya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan Pada tahap ini, petugas bertindak sebagai agen perubahan "*Exchange 11 agent*" yang secara partisipatif akan melibatkan warga untuk berpikir mengenai masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana menemukan solusi dari masalah

tersebut. Di sini masyarakat diharapkan mampu berpikir mengenai alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Demi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat, alternatif program yang dipilih harus menunjukkan program kerja atau kegiatan yang paling efektif dan efisien.

4. Tahap Formalisasi Rencana Aksi Tahap ini mengharuskan agen perubahan untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah pada tiap-tiap kelompok. Petugas juga membantu merealisasikan gagasan yang diciptakan ke dalam tulisan, terutama apabila berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyalur dana, agar penyalur dana memahami tujuan dan sasaran dari program pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

5. Tahap (Implementasi) Program atau Kegiatan Upaya mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran masyarakat sebagai kader, sehingga diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Pentingnya kerja sama antara petugas dengan masyarakat adalah salah satu hal yang penting pada tahap ini, hal ini dikarenakan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik berpotensi melenceng saat di lapangan. Agar tidak menghadapi kendala yang serius pada saat implementasi, suatu program harus di sosialisasikan terlebih dahulu.

Hal ini bertujuan supaya para peserta memahami secara jelas apa maksud, tujuan, dan sasaran dari program tersebut.

- 
6. Tahap Evaluasi Sebagai bentuk proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program masyarakat, evaluasi sebaiknya dilakukan melibatkan masyarakat. Melalui pelibatan warga masyarakat, harapannya akan terbentuk suatu sistem komunitas pengawasan internal dalam jangka pendek. Mampu membangun komunikasi masyarakat secara lebih mandiri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk jangka panjang. Evaluasi diharapkan dapat mengukur dengan jelas kendala-kendala yang dihadapi, tolok ukur keberhasilan tercapainya suatu program untuk menemukan inovasi dan mengantisipasi agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi.
7. Tahap Terminasi Tahap ini merupakan sebuah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahap ini, proyek diharapkan segera berhenti. Artinya, kondisi masyarakat sebelum diberdayakan telah berubah menjadi lebih baik karena melalui proses pemberdayaan sehingga dapat hidup lebih layak. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya membangun desa dengan mengutamakan, mengedepankan, bahkan melindungi hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengambilan 13 keputusan terhadap aset pembangunan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi

juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

1.5.3 Program Stop BABS

Berdasarkan Permenkes no. 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), penyelenggaraan STBM ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar terwujudnya tujuan STBM tersebut terdapat lima pilar STBM yang terdiri stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga yang harus dipedomani setiap daerah untuk menciptakan kota sehat.

Dalam mewujudkan kota sehat tersebut upaya yang dilakukan pemerintah ini salah satunya yaitu melalui program Stop BABS. Program Stop BABS merupakan singkatan dari Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang dimana Stop BABS itu adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Stop BABS adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak BABS. Perilaku Stop BABS diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter berupa jamban sehat dan pembuangan sisa buang air. Saniter merupakan kondisi

fasilitas sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yaitu:
(Kementerian Kesehatan RI, 2009)

1. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.
2. Dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebar penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status Stop BABS berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2014 antara lain: (Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, 2014)

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
4. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% kepala keluarga mempunyai jamban sehat.
5. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah dijangkau oleh

penghuni rumah. Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jambatan terdiri dari :

1. Bangunan atas jamban (dinding atau atap)

Bangunan atas jamban harus berfungsi untuk melindungi pemakai dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.

2. Bangunan tengah jamban

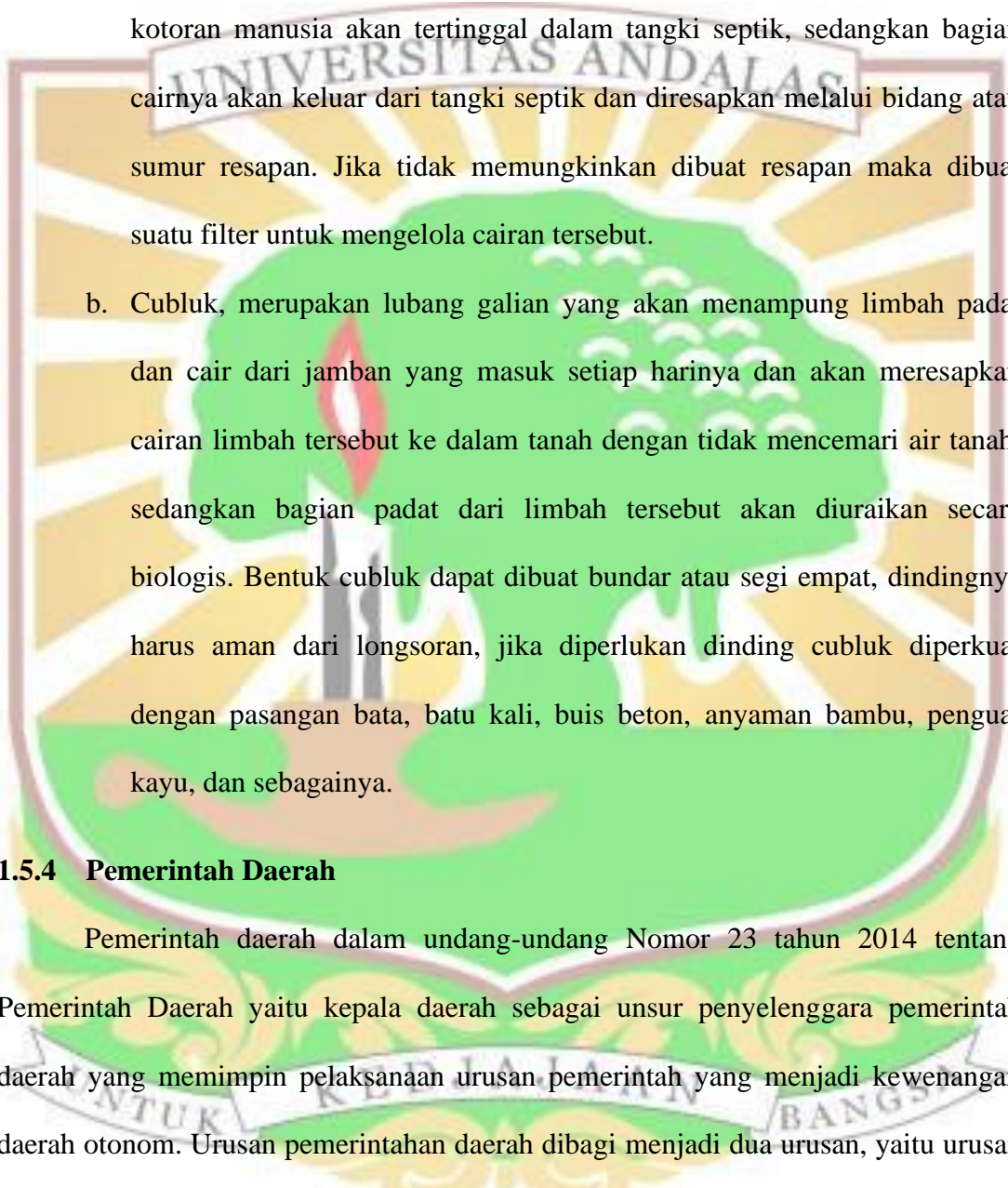
Terdapat dua bagian bangunan tengah jamban, yaitu:

- a. Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urine) yang saniter dilengkapi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang dapat dibuat tanpa konstruksi leher angsa, tetapi harus diberi tutup.
- b. Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL)

3. Bangunan Bawah

Merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vektor pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat dua macam bentuk bangunan bawah jamban, yaitu:

- 
- a. Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung limbah kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan tertinggal dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang atau sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut.
- b. Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis. Bentuk cubluk dapat dibuat bundar atau segi empat, dindingnya harus aman dari longsor, jika diperlukan dinding cubluk diperkuat dengan pasangan bata, batu kali, buis beton, anyaman bambu, penguat kayu, dan sebagainya.

1.5.4 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Urusan pemerintah wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.

Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur daerah dan membuat regulasi daerah. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan peran pemerintah sebagai pelayan publik untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife. Menurut Jim Ife (dalam Zuvaedi, 2013:63) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Menurut Jim Ife (2006:130) dalam pemberdayaan ada dua konsep penting dalam melihat masyarakat

yang tidak berdaya yaitu karena tidak memiliki kekuatan (*power*) dan karena kurang beruntung (*disadvantaged*).

Jim Ife (2006:140) mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang harus dimiliki masyarakat sehingga dapat memberdayakan mereka, diantaranya kekuatan atas pilihan pribadi, kekuatan untuk mempertahankan hak asasi manusia, kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, kekuatan atas gagasan atau kebebasan berekspresi, kekuatan atas lembaga-lembaga, kekuatan atas sumber daya, kekuatan atas kegiatan ekonomi, kekuatan atas reproduksi.

Pada penelitian ini, peneliti mengaitkan dengan beberapa kekuatan (*power*) yang sudah disebutkan diatas. Pertama, kekuatan atas menentukan kebutuhannya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat harus memberikan penghormatan dan pengakuan atas pengetahuan dan pengalaman, serta kearifan lokal yang dimiliki. Kedua, kekuatan atas gagasan atau kebebasan berekspresi. Upaya pemberdayaan masyarakat harus memberikan kebebasan berpikir dan tidak mendikte pandangan seseorang atau masyarakat. Ketiga, kekuatan atas sumber daya. Proses pemberdayaan harus memaksimalkan kekuatan setiap orang terhadap pemanfaatan sumber daya baik keuangan maupun non-keuangan (pendidikan, pekerjaan, pengalaman kebudayaan). Terakhir, kekuatan atas kegiatan ekonomi. Proses pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi. Jadi, untuk memberdayakan masyarakat ada beberapa strategi yang dikemukakan oleh Jim Ife, dari beberapa strategi tersebut dalam penelitian ini mengacu kepada strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan perencanaan, dan pemberdayaan

melalui pendidikan dan keterampilan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga untuk mewujudkan akses yang lebih adil terhadap sumber daya, layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif untuk membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dan meningkatkan kekuatan mereka.

Ife berpendapat bahwa konsep pemberdayaan pada dasarnya berkaitan erat dengan dua konsep pokok, yaitu: konsep power (daya), dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Pengertian ini menurut Ife akan menggunakan empat perspektif, yakni pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku Pengembangan Masyarakat ditulis oleh Zubaedi (2013). Menjelaskan empat perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pluralis menilai pemberdayaan sebagai sebuah proses untuk menolong individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat yang dianggap kurang beruntung, agar dapat bersaing dengan lebih efektif. Perspektif ini menyebut bahwa pemberdayaan yang dilakukan adalah peningkatan kapabilitas warga masyarakat untuk bersaing secara wajar tanpa menang dan kalah.
2. Perspektif elitis biasanya memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh kepada kalangan elit, seperti para pemuka agama, atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, maupun lainnya dengan cara membentuk aliansi dengan mereka.

3. Perspektif strukturalis melihat pemberdayaan sebagai kegiatan yang bertujuan menghapuskan bentuk ketimpangan sosial dan lebih menantang. Artinya, pemberdayaan menjadi suatu proses yang harus diimbangi dengan perubahan struktural secara fundamental melalui penghapusan penindasan struktural.
4. Perspektif post-strukturalis biasanya melihat pemberdayaan sebuah upaya penting pada aspek intelektualitas, ketimbang aksi atau praksisnya sebagai sebuah diskursus. Maksudnya disini adalah pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah untuk mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan ini pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan ialah suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini sangat dibutuhkan. Hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan pedoman dan perbandingan bagi penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dijalankan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Mardewi Wahyuningsih . 2016. Ilmu Administrasi Publik.	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan pemerintah Desa Kandangan telah	1. Meneliti tentang Program Stop BABS 2. Metode	1. Fokus dan tujuan penelitian .

	Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Negeri Surabaya	2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Studi Pada Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Kandangan Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro	mengimplemetasi kan program stop buang air besar sembarangan ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi.	Penelitian.	2. Lokasi Penelitian.
2	Annisa Dwi Novita Sari. 2018. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Diponegoro	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Menekan Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengimplementasikan program Buang Air Besar Semabarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF) sudah berjalan dengan optimal.	1. Meneliti tentang Program Stop BABS.	1. Fokus dan Tujuan Penelitian. 2. Lokasi Penelitian. 3. Metode Penelitian.
3	Feby Okta Yendra. 2019. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang.	Gambaran Upaya Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Nagari Sipotu Kecamatan Sungai Pagu	Dari penelitian yang telah dilakukan untuk proses perencanaan pemicuan masyarakat dominan belum mengetahui cara identifikasi masalah	1. Meneliti tentang Program Stop BABS. 2. Metode Penelitian	1. Fokus dan tujuan Penelitian. 2. Lokasi Penelitian.

		Tahun 2019	kebutuhan dan analisis situasi, persiapan fasilitator, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, untuk proses pemicuan masyarakat dominan belum mengetahui cara pencairan suasana dalam pemicuan, transect walk karena pada saat pemicuan tidak dilakukan penelusuran wilayah, alur kontaminasi pada pemicuan serta simulasi air yang terkontaminasi dalam pemicuan.	
--	--	------------	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:4) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan menurut metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan perbuatan manusia

serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014, p. 13). Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ini berupa gambaran, penjelasan, deskripsi kata-kata dan tindakan yang dilakukan informan. Penggunaan penelitian kualitatif ini didasarkan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dirasa lebih tepat menjawab masalah penelitian yang telah peneliti lakukan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan serta data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dengan tipe penelitian ini dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif ini dikarenakan peneliti menganalisis dan mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta mengamati secara lebih detail terkait peran dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan keberhasilan Program Stop BABS.

1.6.2 Informan Penelitian

Orang yang berpengaruh dalam sebuah penelitian yang nantinya akan memberikan informasi kepada peneliti disebut dengan informan penelitian. Informan penelitian itu dapat memberikan informasi yang berasal dari dirinya sendiri dan dari kejadian yang telah terjadi (Afrizal, 2014, p. 139). Teknik menentukan informan pada

penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Dalam penelitian ini, peneliti mempertimbangkan untuk memilih informan sebagai sumber data penelitian diantaranya adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan masyarakat. Pertimbangan tersebut diharapkan peneliti mendapatkan data yang maksimal untuk mendeskripsikan data (Sugiyono, 2016). Kriteria informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pihak Dinas Kesehatan di bidang Kesehatan Masyarakat dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang bertanggung jawab dalam terlaksanan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Petugas Puskesmas yang mengawasi dan mengontrol Program Stop Buang Air Besar Sembarangan.
3. Perangkat Kelurahan yang mengawasi dan mengontrol masyarakat dalam Program Stop Buang Air Besar Sembarangan

Berdasarkan pengamatannya, ia mengkategorikan informan penelitian menjadi dua:

a. Informan Pelaku

Informan pelaku yaitu informan yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, perbuatannya, pikirannya hingga pengalamannya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Mereka ialah subjek penelitian serta

sumber data utama dalam penelitian. Informan pelaku dalam penelitian ini terdapat lima orang diantaranya adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Sub. Koordinasi Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Petugas Puskesmas Gunung di bidang Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Staff Kemasyarakatan Kelurahan Ekor Lubuk, dan juga Ketua Forum Kota Sehat Padang Panjang.

b. Informan Pengamat

Informan pengamat yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat ini boleh jadi bukan orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti maupun meraka ini dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian. Informan pengamat dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, diantaranya masyarakat yang menerima bantuan dari Program Stop BABS, tokoh masyarakat, dan dua orang masyarakat yang mengetahui tentang masalah buang air besar sembarangan ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat sembilan orang informan pelaku dan pengamat, berikut pada tabel 1.2 diperjelas informan pelaku dan informan pengamat dalam penelitian ini:

Tabel 1. 2
Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Jenis	Jabatan/Pekerjaan	Kategori
-----	------	------	-------	-------------------	----------

			Kelamin		Informan
1.	Rahmaisa, SKM.	45	Perempuan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	Pelaku
2.	Susilawitri, SKM.	44	Perempuan	Petugas Puskesmas (Pelayanan Kesehatan Lingkungan)	Pelaku
3.	Medi Nelson	53	Laki-Laki	Staff Kemasyarakatan Kelurahan Ekor Lubuk	Pelaku
4.	Novriza Yulida, SKM, MPH	39	Perempuan	Sub. Koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	Pelaku
5.	Hariyanto, A.Md	47	Laki-Laki	Ketua Forum Kota Sehat Padang Panjang	Pelaku
6.	Dzulbahri	53	Laki-Laki	Petani	Pengamat
7.	Ahmad Imran	51	Laki-Laki	Wirausaha	Pengamat
8.	Evi Era	49	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Pengamat
9.	Ilham Malik	46	Laki-Laki	Wirausaha/ Ketua RT 8 Kelurahan Ekor Lubuk	Pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal pada penelitian kualitatif data yang diambil ialah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014, p. 17). Menurut Sugiyono, ia membagi data penelitian menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan sumber data langsung yang diberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam ini langsung data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan Program Stop BABS.

Data yang dibutuhkan dalam data primer ini berupa:

2. Data sekunder, merupakan data berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang informasi seputar penelitian. Dokumen yang diperoleh dapat berupa data dari kelurahan, kecamatan, berita, artikel, surat kabar majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud berupa data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang mengenai Program Stop BABS, berita online, buku, serta jurnal guna menambah bahan referensi berupa data mengenai proses dalam pengambilan keputusan dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan, interpretasi atau makna-makna, kejadian, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara individu, ataupun kelompok sosial. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Dalam mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang harus memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif wawancara dilakukan seperti dua orang sedang bercakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014, p. 21). Wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses penggalian informasi secara mendalam, terperinci dan terbuka yang bertujuan mencapai tujuan penelitian. Dalam wawancara mendalam ini perlu dilakukan berulang ulang kali dikarenakan peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dalam setiap pertanyaan dengan tujuan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Berulang kali ini yaitu lebih mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal yang muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014). Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai strategi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan Program Stop BABS sebagai representatif dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tahapan yang telah dilakukan dalam wawancara ini adalah dengan membuat kesepakatan dengan informan terkait, tentukan jadwal wawancara yang dilakukan dan juga menanyakan beberapa pertanyaan terkait Program

Stop BABS. Jika wawancara pertama tidak selesai atau pertanyaan penelitian belum terjawab, maka perlu diadakan negosiasi antara peneliti dan informan terhadap mengatur kembali jadwal wawancara untuk menyelesaikan wawancara dan menjawab semua daftar pertanyaan penelitian. Teknik wawancara mendalam ini menggunakan pedoman wawancara buku catatan lapangan, pena, recorder/alat perekam, dan juga kamera untuk pengambilan foto dan video untuk menyimpan hasil wawancara mendalam.

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dikarenakan dapat terlaksana secara leluasa dan mendalam dengan para informan yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan tolak ukur yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan secara langsung dimulai pada tanggal 23 Mei 2023 dengan mendatangi Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk melakukan wawancara dengan Ibu Rahmaisa selaku Kabid Kesehatan Masyarakat dan Novrizia Yulida selaku Sub. Koordinator Kesehatan Lingkungan yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam program Stop BABS. Kemudian melanjutkan wawancara yang dimulai pada tanggal 24 hingga tanggal 29 Mei 2023 untuk mewawancarai pihak kelurahan yang bertanggung jawab dalam program Stop BABS, pihak Puskesmas Gunung. Dikarenakan kurangnya data terkait penelitian ini, peneliti menambahkan beberapa informan pada tanggal 14 Juni dan 19 Juni 2023 dengan mewawancarai beberapa informan yang terdiri dari niniak mamak selaku tokoh masyarakat.

2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung aktivitas informan di lapangan. Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan, peneliti perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri, atau merasakan sendiri (Afrizal, 2014, p. 21). Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dengan mengamati informan menggunakan panca indera sehingga peneliti dapat memahami setiap kegiatan yang dilakukan informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati strategi Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dalam mewujudkan Program Stop BABS dengan alat kamera handphone.

Observasi dilakukan peneliti dimulai pada bulan April 2023 ketika peneliti turun ke lapangan, dimana peneliti berkunjung ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, kantor Kelurahan Ekor Lubuk, Puskesmas Gunung. Pada saat di kantor Dinas Kesehatan peneliti disambut dengan baik oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan beserta perangkatnya yang berada di tempat. pengamatan atau observasi ini dilakukan bersamaan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Selain mengamati interaksi, peneliti juga mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengurus program Stop BABS ini seperti kegiatan yang dilakukan setiap harinya pada kegiatan Dinas Kesehatan, Kelurahan Ekor

Lubuk, dan Puskesmas Gunung. Bersamaan saat peneliti melakukan wawancara dengan pengurus program inovasi tersebut.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis seperti berita di media, notulensi, surat menyurat dan laporan informasi yang terkait (Afrizal, 2014, p. 21). Untuk mengecek ketepatan informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada dilapangan. Dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat berupa laporan, foto, dan lain sebagainya.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan menyusun pedoman wawancara bersama dosen pembimbing. Kemudian sebelum turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian melalui Dekanat FISIP. Setelah mendapatkan surat izin penelitian yang dikirim melalui *WhatsApp*, peneliti langsung datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Senin 9 April 2023 untuk memberikan surat izin penelitian, setelah mendapatkan surat izin dari Kantor DPMPTSP, selanjutnya pada siang harinya peneliti menyerahkan surat izin ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk permohonan izin penelitian terkait program Stop Buang Air Besar

Sembarangan di Kelurahan Ekor Lubuk. Surat izin penelitian tersebut resmi dikeluarkan pada Jum'at, 14 April 2023.

Pada tanggal 23 Mei 2023, peneliti mulai turun lapangan dengan mewawancarai informan secara mendalam. Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Kabid. Kesehatan Masyarakat dan P2P yang berlokasi di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Dalam sesi wawancara dengan Ibu Rahmaisa ini, beliau menceritakan tentang Program Stop BABS dan juga menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara di keesokan harinya dengan Ibu Susilawitri dari Puskesmas Gunung, yang merupakan salah satu dari pihak puskesmas yang ikut bertanggung jawab dalam program ini, Ibu Susilawitri menjelaskan tentang program dan juga menjelaskan peran penting pihak puskesmas dalam berjalannya program ini. Dihari yang bersamaan peneliti mewawancarai salah seorang pihak kelurahan yaitu bapak Medi Nelson, beliau juga mengetahui bagaimana proses berjalannya program Stop BABS ini dan juga mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti lebih dahulu menghubungi para informan melalui telepon maupun pesan untuk menentukan jadwal wawancara.

Pada penelitian ini jumlah informan berjumlah 9 orang dengan 5 orang informan pelaku diantaranya 2 orang dari pihak Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan P2P dan Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, satu orang dari pihak Kelurahan Ekor Lubuk, serta satu

orang dari pihak Puskesmas Gunung. Selanjutnya terdapat 4 orang informan pengamat yang terdiri dari 3 orang masyarakat Kelurahan Ekor Lubuk dan satu orang dari pihak tokoh masyarakat yaitu niniak mamak. Dalam proses pengumpulan data dari informan pelaku dan pengamat ini peneliti merasa tentu tidaklah mudah, karena membutuhkan usaha dimulai dengan pembuatan janji yang kadang sulit karena informan ada yang sibuk, sehingga mengharuskan informan menunggu dan juga langsung datang ke rumah informan.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif unit analisis data sangat dibutuhkan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian atau untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan siapa, apa, tentang apa proses pengumpulan data terfokus. Unit analisis dalam sebuah penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi dan waktu tertentu sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

Unit analisis dalam penelitian ini berupa organisasi yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan sebagai aktor penggerak dalam mewujudkan Program Stop BABS.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling berkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014, pp. 175–176). Dalam menganalisis data, peneliti

menentukan data penting, menginterpretasikan, menegelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Ia membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu:

a. Kodifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan ditulis kembali dan diberikan nama atau pengkodean terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti dapat mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga peneliti dapat membedakan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi penting merupakan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, sedangkan pernyataan informan yang tidak berkaitan dengan pernyataan informan dianggap sebagai data yang tidak penting. Hasil dari tahap kodifikasi data ini ialah memperoleh tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian (Afrizal, 2014). Dari klasifikasi ini maka peneliti memfokuskan interpretasinya terhadap penggalan informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitiannya.

b. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan (Afrizal, 2014). Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan

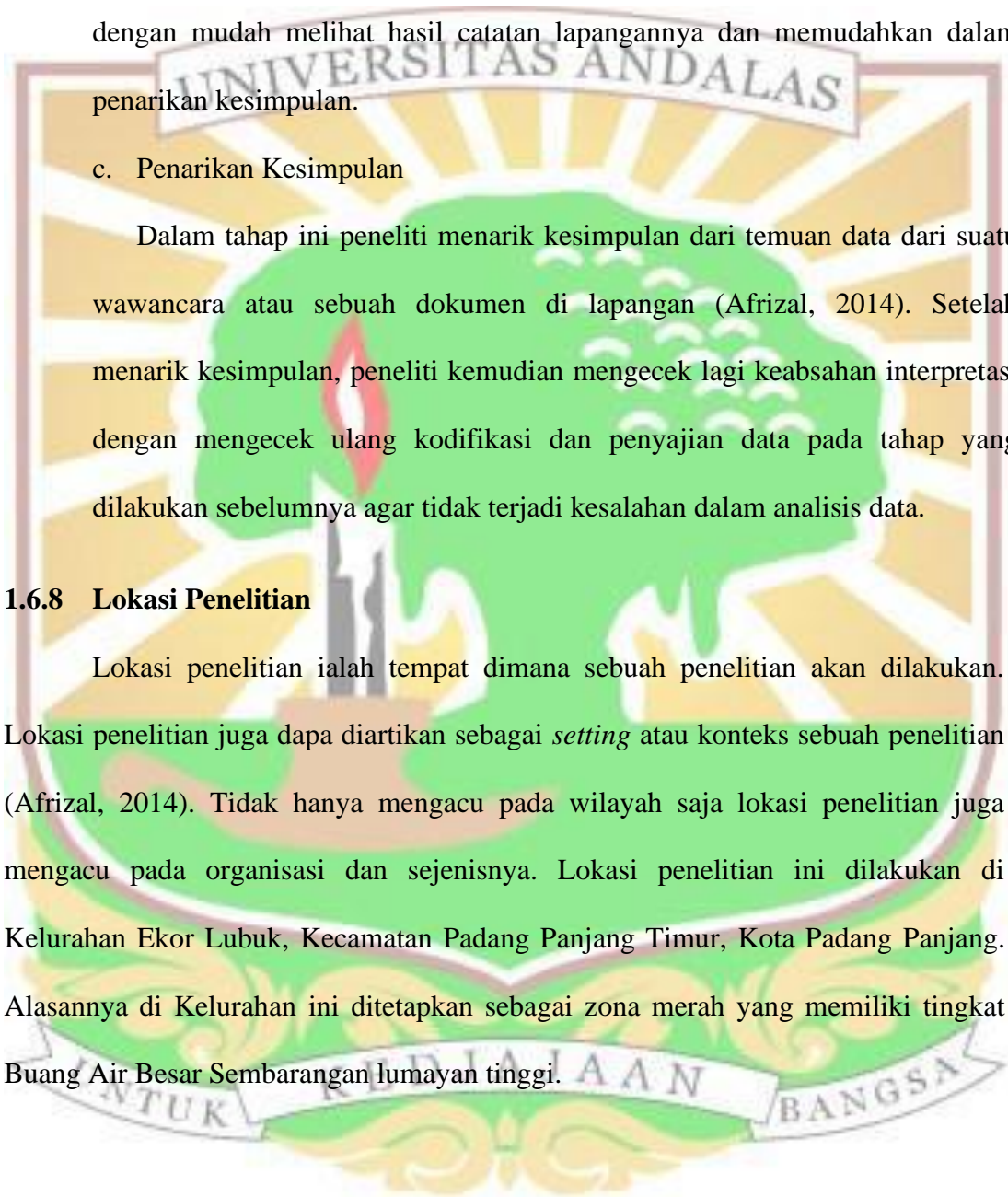
matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data dari suatu wawancara atau sebuah dokumen di lapangan (Afrizal, 2014). Setelah menarik kesimpulan, peneliti kemudian mengecek lagi keabsahan interpretasi dengan mengecek ulang kodifikasi dan penyajian data pada tahap yang dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian (Afrizal, 2014). Tidak hanya mengacu pada wilayah saja lokasi penelitian juga mengacu pada organisasi dan sejenisnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Alasannya di Kelurahan ini ditetapkan sebagai zona merah yang memiliki tingkat Buang Air Besar Sembarangan lumayan tinggi.



1.6.9 Definisi Operasional Konsep

a. Strategi

Strategi merupakan sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang, strategi juga hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan sebuah pemberdayaan terhadap masyarakat serta langkah-langkah dalam mewujudkannya.

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu dimana suatu kondisi masyarakat telah bisa melakukan atau menghadapi masalah-masalah secara mandiri.

c. Buang Air Besar Sembarangan

Merupakan perilaku buang air besar sembarangan yang nantinya hasil dari limbah akhir tersebut dapat mengakibatkan suatu masalah, seperti penyakit, bau yang tidak enak, maupun lingkungan yang kotor.

d. Program Stop BABS

Stop BABS merupakan singkatan dari Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang dimana Stop BABS itu adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Stop BABS disini didukung dari program dari pemerintah yang membuatkan jamban sehat untuk masyarakatnya.

e. Pemerintah Daerah

Pemerintah memiliki peran sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat diserahkan

